

**PERSIAPAN SOSIAL DAN PenguATAN KELEMBAGAAN
BAGI PENERIMA MANFAAT DALAM MENUNJANG
PROGRAM REDD “ REDUCTION OF EMISSION FROM
DEFORESTATION and DEGRADATION’**

4

Oleh: Hasan Muhammad dan Syufri

ABSTRAK

Saat ini Indonesia berada pada rangking ke 14 negara penghasil emisi karbon dunia (Berdasarkan data Human Development Report tahun 2008), yang sebenarnya masih jauh dari negara-negara industri maju lainnya. Namun peringkat ini dapat saja bergerak naik dan mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara industri maju penghasil emisi karbon lainnya, seiring dengan penambahan penduduk Indonesia saat ini, yang salah satu implikasinya adalah terjadinya rambahan hutan, baik hutan lindung, taman nasional, maupun hutan masyarakat. Masalah tersebut tidak terkecuali di Sulawesi Tengah khususnya di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Sadar akan hal tersebut, maka program Reduction Of Emission From Deforestation And Degradation (REDD) menjadi salah satu solusinya. Namun dalam penerapannya sangat diperlukan persiapan sosial dan penguatan kelembagaan masyarakat, khususnya penerima manfaat, agar mereka dapat menerima dengan baik program tersebut

Kata Kunci: REDD), Persiapan sosial, dan Penguatan kelembagaan.

PENDAHULUAN

Kita adalah penduduk bumi yang tinggal dibelahan bumi Nusantara, bumi yang kita pijak dinamakan Indonesia. Di bumi ini ada dikotomi antara negara Industri dan negara sedang berkembang “negara dunia ketiga”. Di bumi ini sebagian orang beranggapan bahwa terdapat ketidakadilan di antara penduduk bumi. Negara industri sejak lama maju yang ditandai dengan revolusi industri dan “seakan-akan sadar” terhadap emisi kemudian melakukan hegemoni pada negara berkembang dengan konsep atau program “Reduction of Emission From Deforestation and Degradation” (REDD) salah satu skema dalam perubahan iklim.

Berdasarkan data Human Development Report tahun 2008, Indonesia ditempatkan sebagai negara peringkat ke -14 untuk penghasil emisi karbon di dunia, jauh dibawah negara-negara industri maju yang menggelontorkan karbon ke atmosfer dari aktivitas industrinya (Dodik Ridho Nurrochmat, M.Fadhil Hasan, 2012)

Bagi masyarakat di negara sedang berkembang, sangat menghormati bumi ini, sebagaimana pandangan yang dinyatakan dalam surat salah seorang Ketua Suku Seattle (Shiva. Vandana, 1997), yang berbunyi ”hal ini kami tahu----Bumi bukanlah milik manusia, manusialah milik bumi. Semuanya berkaitan seperti darah yang mempersatukan sebuah keluarga. Apapun yang menimpa bumi akan menimpa putra-putra bumi. Manusia tidak mengenyam jaring kehidupan, manusia hanyalah seutas benang dalam jaring itu. Ia lakukan atas dirinya sendiri.”

Bagi masyarakat yang memang memperlakukan hutan dengan arif kehadiran REDD tidak membuat sesuatu yang mengagetkan dan menakutkan. Namun karena hal ini berhubungan dengan negara lain khususnya negara industri maka menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan.

Kehadiran REDD masih menyimpan banyak pertanyaan yang perlu dijawab, diantaranya adalah: (1) apakah negara industri bersedia menurunkan produktivitas industrinya guna menurunkan emisi atau hanya melemparkan tanggung jawab itu pada negara berkembang; (2) bagaimana mekanisme pendanaan sebagai konsekuensi dari program REDD; (3) apakah benar deforestasi dan degradasi hutan adalah salah satu sumber emisi karbon terbesar. Pandangan negatif pada negara-negara industri dapat melemahkan program REDD. Sosialisasi dan penguatan yang berkelanjutan sangat diperlukan dalam rangka persiapan sosial bagi penerima manfaat tersebut.

Persiapan sosial dan penguatan kelembagaan bagi masyarakat yang menerima manfaat sebagai kelompok sasaran sejalan dengan program REDD. Karena salah satu perhatian REDD adalah kawasan konservasi, diantaranya hutan lindung yang masih utuh, taman nasional dan hutan masyarakat. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang perlu dilakukan, baik berhubungan langsung dengan konservasi maupun kegiatan penunjang.

Keberhasilan program REDD sangat ditentukan oleh keyakinan atas manfaat yang akan diterima masyarakat dalam program tersebut serta seberapa besar kepedulian pihak luar dalam melakukan persiapan sosial dan penguatan kelembagaan masyarakat sasaran. Sebab jika masyarakat tidak punya pilihan lain dalam menunjang kehidupannya maka sangat dipastikan akan memasuki kawasan larangan. Sebagaimana yang dinyatakan Barraclough dan Ghimire, bahwa, usaha untuk melindungi hutan-hutan yang dilindungi melalui peraturan akan menjadi sia-sia, jika masyarakat tidak memiliki sumber-sumber kehidupan lain selain kembali menyerbu hutan (Dietz Ton,1998). Ini menunjukkan bahwa persiapan sosial dan penguatan kelembagaan masyarakat disekitar atau di dalam hutan menjadi sesuatu yang penting. Masyarakat lokal di Sulawesi Tengah umumnya memperlakukan hutan dengan baik, namun dengan masuknya pengaruh dari luar semakin mempercepat terjadinya perubahan. Perubahan sosial berdampak pada menurunnya peranan adat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Sebagaimana masyarakat di seputar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dengan aturan adatnya yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Semula Orang Lindu melihat bahwa wilayah yang mereka kuasai sebagai hak ulayat "suakangata" hak masyarakat adat. Pemanfaatannya diatur berdasarkan sistem zonasi, namun ketika klaim Taman Nasional dan sebagian besar kawasannya dikuasai oleh pendatang maka secara terpaksa mereka harus melanggar aturan taman nasional dan juga aturan adatnya. (sebagaimana dikuatirkan oleh Barraclough dan Ghimire)

Dari sekilas pendahuluan tersebut, ada beberapa yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan tulisan ini yang berhubungan dengan Program REDD, diantaranya: (1)

persiapan sosial dan penguatan kelembagaan; (2) Pemberdayaan melalui penguatan ekonomi keluarga; (3) pendampingan dan pembuatan peraturan desa tentang konservasi; (4) pelatihan dan pendampingan.

PEMBAHASAN

Penguatan Kelembagaan Lokal

Umumnya masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah hidup berdampingan dengan hutan, baik hutan produksi maupun hutan yang karena statusnya dilindungi. Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi tengah luasnya lebih kurang 4.394.932 Ha yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 dan sampai saat ini belum ada penetapan baru soal luasannya.

Masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan hutan umumnya menggantungkan harapannya pada hutan. Dalam mempertahankan hidup, mereka memanfaatkan hutan dengan arief. Hal ini berlaku sebelum kemajuan melanda pada masyarakat itu.

Sebagaimana fenomena di Dataran Lindu, Pada kawasan ini dihuni oleh etnik Lindu yang menyakini, bahwa sumber daya alam di Dataran Lindu adalah sebagai *suakangata* (Hak adat masyarakat) yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Salah satu kearifan ekologi di daerah ini adalah keyakinan terhadap *suaka nuviata*. Sebagaimana yang disampaikan pengurus adat Dataran Lindu.

.....dahulu suaka nuviata sebagai suatu yang sangat menakutkan, saat kita masih anak-anak merasa takut kalau berjalan tengah hari (jam 12 siang) atau ketika matahari mulai tenggelam (jam 17.30) melewati suaka nuviata, sekarang tidak lagi, sebab sejak lama suaka nuviata dimasuki todea yang diawali pendatang.

Pandangan terhadap kekuatan roh pada kawasan nuviata sudah mulai menurun. Untuk menimbulkan kembali keyakinan tersebut diantaranya penguatan kelembagaan lokal yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Selain itu, masyarakat Lindu dalam melihat hutan, sebagai: *pebolagoa* (tempat mengambil Rotan); *panasoa* (tempat mengambil Pandan hutan); *panimbea* (atap rumah); *pangalabola* (kayu bahan rumah); *petabaduanga* (kayu untuk perahu); *podikia/ mopelua* (berburu/jerat); *pomankia/ tabaro* (sagu); *peuwua* (tempat mengambil sayur rotan) dan lain. Pemanfaatan sumberdaya hutan tersebut hanya sesuai dengan kebutuhan hidup semata dan bukan untuk komersial.

Kekuatan adat semakin lama semakin melemah, kita sadari bahwa penyebab melemahnya aturan adat ini banyak faktor, diantaranya adalah kompetisi antara masyarakat lokal dengan pendatang dalam pembukaan lahan baru, akibatnya kawasan yang dulunya dikeramatkan, menjadi dilanggar.

Dalam mengatasi aturan adat yang semakin melemah, diperlukan penguatan kelembagaan adat. Lembaga adat sebagaimana di Dataran Lindu hampir kurang diperhatikan. Idealnya kalau kelembagaan di perhatikan maka sangat diyakini dapat membangkitkan semangat dalam menerapkan aturan adat yang sudah mulai dilupan.

Pada sisi lain, dalam program REDD, sangat diperlukan persiapan sosial masyarakat penerima manfaat, agar mereka dapat menerima dengan baik program tersebut. Salah satu jalan adalah melakukan sosialisasi terhadap kehadiran REDD sehingga konsep tersebut terinternalisasi dalam pikiran individu dan pada gilirannya dapat mendukung program tersebut.

Pemberdayaan melalui penguatan Ekonomi Keluarga

Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang hidup berdekatan atau hidup dalam hutan hanya dalam mempertahankan hidup, seperti masyarakat di dataran Lindu. Cara-cara hidup mereka sudah mengalami perubahan khususnya dalam mempertahankan hidup. Albert Schrauwers (Li, Tania Murray. 2002), menilai ekonomi tani kecil yang alami berwatak universal yang telah ada sebelum mereka mengenal hubungan kapital. Ekonomi subsisten ini ditandai oleh produksi yang tujuannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, syaratnya adalah jaminan kebutuhan hidup tetap tersedia.

Masuknya ekonomi uang dan budaya konsumtif telah mempengaruhi perilaku masyarakat asli yang tak dapat lagi sepenuhnya hidup dalam budaya subsistensi. Masyarakat lokal yang hidup di hutan, menggantungkan harapan pada hutan dan mereka hidup dari hutan sesuai dengan kebutuhannya, kemudian tergantikan dengan suatu dorongan yang kuat untuk memproduksi secara berlebihan karena dipengaruhi oleh desakan hidup yang bersifat konsumtif.

Walaupun mereka berupaya dengan segala kekuatan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, mereka tetap termarginal, menurut Almarhum Prof Koesnaka Adimihardja⁵ bahwa proses marginalisasi masyarakat adat itu berkaitan dengan faktor-faktor struktural. Dengan demikian penyelesaiannya pun harus melalui perubahan struktural. Masjinalisasi dapat diatasi dengan demokratisasi melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dan pendampingan.

Pemberdayaan atau *Eempowerment* muncul dengan dua premis mayor, yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksudkan adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan adalah adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antaragenerasi dan pertumbuhan ekonomi secara memadai.

Dalam konteks seperti ini maka pembangunan ekonomi harus diterjemahkan sebagai proses meningkatkan derajat kebebasan manusia dalam menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Oleh karena itu, kemajuan ekonomi secara berkesinambungan harus didukung sumberdaya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi. Prakarsa hanya tumbuh apabila terdapat emansipasi serta kesempatan yang penuh untuk berpartisipasi dalam proses perubahan.

⁵ Disampaikan dalam Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 15-16 Maret 1999

Pemberdayaan, sebagai konsep alternatif pembangunan, dengan demikian menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berdasarkan pada sumberdaya pribadi, partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Kegagalan berbagai proyek yang masuk di pedesaan adalah disebabkan karena tidak melibatkan masyarakat mulai dari merencanakan sampai mengevaluasi kegiatan tersebut. Paradigma *Top Dawn* tidak lagi dapat menyelesaikan masalah, maka kecenderungannya adalah pergantian paradigma, yaitu paradigma *button Up planing*.

Dalam upaya pemberdayaan tidak lepas dari masalah kemiskinan sebagai sasaran dalam pemberdayaan, oleh karena itu antara pemberdayaan dan kemiskinan dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sudah cukup banyak program yang ditujukan pada masyarakat miskin, namun dinilai masih belum maksimal. Pertimbangan itulah, maka penguatan kelembagaan ekonomi menjadi sesuatu yang amat penting.

Dalam menunjang kelembagaan ekonomi keluarga tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya adalah: (1) pelatihan partisipatif kelompok sasaran yang nantinya sebagai fasilitator desa; (2) sosialisasi dan pendampingan,

Sosialisasi dan pendampingan merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan dalam program pemberdayaan. Alasannya adalah kelompok sasaran perlu mengetahui tujuan dari suatu kegiatan khususnya menyangkut REDD. Sasaran sosialisasi adalah masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha dan juga pada pemerintahan desa. Harapan dari sosialisasi ini adalah agar program REDD terinternalisasi dalam diri setiap individu maupun kelompok.

Demikian pula pendampingan, kegagalan suatu program karena tidak adanya pendampingan, atau pendampingan dilakukan oleh orang luar yang intensitasnya terbatas.

Penguatan Peraturan Desa Tentang konservasi.

Salah satu penyebab terjadinya marjinalisasi masyarakat adat/lokal adalah disebabkan karena struktural. Selain pembenahan berbagai kebijakan yang dapat melemahkan masyarakat adat sebaiknya direvisi. Kemudian dilakukan pendampingan pada pemerintahan desa guna melahirkan peraturan desa (perdes) yang mengatur tentang konservasi.

Selain kekuatan adat sebagai produk hukum yang tidak tertulis, diperlukan pula produk hukum yang tertulis berupa peraturan desa yang dijadikan pegangan masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi lebih bijaksana. Pendampingan dalam penyusunan perdes diawali dengan pelatihan dari beberapa desa yang dianggap potensial dalam mempertahankan hutan sehingga memudahkan dalam proses pendampingan.

Pelatihan dan pendampingan

Pelatihan dan pendampingan dilakukan guna menciptakan fasilitator desa yang nantinya bertugas mendampingi masyarakat. Kegagalan suatu program karena yang

mendampingi adalah orang luar. Jadi kepentingan membentuk fasilitator desa akan lebih memudahkan baik dalam sosialisasi program maupun penerapannya.

KESIMPULAN

1. REDD sebagai program baru, maka sosialisasi sebagai inti dari persiapan sosial menjadi sesuatu yang penting;
2. Demi keberhasilan program REDD, maka penguatan kelembagaan baik kelembagaan ekonomi keluarga maupun penguatan kelembagaan adat perlu dilakukan.
3. Eksistensi pemerintah desa tidak dapat diabaikan, maka selain keterlibatan pemerintah desa juga pendampingan dalam pembuatan perdes tentang konservasi.
4. Pelatihan fasilitator desa diperlukan guna keterlibatan orang dalam sebagai pendamping sehingga memudahkan sosialisasi dan keberlanjutan program REDD

DAFTAR PUSTAKA

- Dietz, Ton.1998. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam*. (terj.) Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, INSIST Press dan REMDEC.
- Li, Tania Murray,2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, yayasan Obor Indonesia
- Muhamad, Hasan (2008). *Potensi Konflik pemanfaatan Sumberday Lokal di Taman Nasional Lore Lindu*, (Disertasi), Pascasarjana Unpad
- Ridho, Dodik Nurrochmat, M.Fadhil Hasan, (ed). (2012).*Ekonomi Politik Kehutanan Mengurangi Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Gramedia.
- Shiva, Vandana, . (1997). *Bebas Dari Pembangunan, Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India* (terj.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan KONPHALINDO.